

EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI DESA BONE-BONE KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENDREKANG

Sahara, Bening Hadilinatih

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis: Sahararight2940@gmail.com, beningwin@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan Peraturan Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Selama ini belum diketahui hasil dan manfaatnya bagi masyarakat terutama untuk anak-anaknya, yang merupakan menjadi permasalahan terkait banyaknya jumlah perokok dikalangan usia anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perdes Nomor 1 tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, baik capaian maupun manfaatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metodewawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informannya antara lain. Kepala Desa Bone-Bone, Mantan Kepala Desa Bone-Bone, Petugas Medis, Guru, Masyarakat Desa Bone-Bone. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok diwilayah Desa Bone-Bone sudah berhasil dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari tujuan perlindungan kesehatan cukup berhasil; ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan rokok; ada penurunan jumlah perokok dari usia produktif dan remaja sebagai pengguna rokok; Pelaksanaan kebijakan cukup baik serta tingkat penyimpangan pelaksanaan yang cukup kecil. pelaksanaan kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok terhadap kesehatan, perekonomian, hubungan sosial yang ada di masyarakat cukup positif.

Adapun saran penelitian ini adalah: (1) cara meningkatkan kesadaran melalui komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat (2) pembentukkan kelompok pengawas dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (3) peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah tentang Perdes Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.

Kata kunci: Evaluasi kebijakan, Dampak Kebijakan, Perdes Nomor 1 Tahun 2009 Bebas Asap Rokok.

Abstract

Village regulations district bone-bone and district baraka enrekang number 1 of the year 2009 smoke free. Are no exact outcomes and for benefits for the community especially in children, that is been a problem with many their children the number of smokers age. This study aims to understand the implementation of perdes number 1 of the years 2009 smoke free, and good for these. Data collection was carried out with methos interview, observation, documentation, the course and among others. Village head bone-bone, village, former head bone-bone medical officers, teachers, village community bone-bone. Data analysis technique using a technique descriptive analysis.

The result showed that the purpose of the 2009 village regulations concerning the region 1 year smoke free village area bone-bone have succeeded relatively well. This is shown to the point of health protection is putting, is to increase public awareness about the dangers of cigarette use, there is a decrease in the number of smokers of reproductive age and teen cigarette as user, policy implementation and the level of is quite small. The implementation of regional policies on health cigarette smoke the economy, social relationship in the community is quite positive.

The advice of this research is: (1) ways to improve their communication between the government and the effective (2) it was reflected from the trustees by involving the various interested parties (3) the more extensive operations to the community and schools about perdes number 1 year smoke free 2009 concerning the region.

Keywords: Policy Evaluation, Impact Policy, 2009 Perdes Number 1 Years Smoke Free

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah pembangunan rakyat yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disebutkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan perlu memperhatikan tiga sektor pembangunan yaitu pendidikan, ekonomi, dan sektor kesehatan. Berbagai program pembangunan disektor pendidikan dan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah. Tidak kalah pentingnya dengan sektor pendidikan dan ekonomi, sektor kesehatan juga perlu diperhatikan dalam pembangunan bangsa. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan preventif dan promotif haruslah menjadi acuan untuk melaksanakan program-program pembangunan di sektor kesehatan.

Indonesia diprediksi akan mengalami masa akhir bonus demografi pada 2030. Sebelum masa itu tiba, Indonesia sebaiknya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Keberhasilan dalam pelaksanaan

pembangunan di sektor kesehatan akan berpengaruh dalam pembentukan SDM yang berkualitas, sehingga sektor kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam upaya menggenjot kualitas SDM tersebut, Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada persoalan tingginya jumlah perokok remaja usia sekolah. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, mencatat 9,1 persen perilaku merokok remaja mengalami kenaikan dibandingkan 2013 yang sebesar 7,2 persen.

Sumber lain menjelaskan bahwa konsumsi rokok merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik dan diabetes meletus dan merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk di negara Indonesia

Namun mengkonsumsi rokok dapat membunuh satu orang setiap detik terlebih bagi pengkonsumsinya. Penelitian epidemiologi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya. sehingga Jika hal ini berlanjut, diperkirakan terjadi 10 juta kematian di tahun 2020.

Dalam kehidupan sehari-hari, merokok merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan oleh masyarakat, baik kalangan atas maupun kalangan menengah kebawah. Saat ini, angka perokok di dunia telah mencapai 1,3 milyar jiwa dimana 84 persen dari perokok ini berasal dari negara miskin dan negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sendiri saat ini berada pada peringkat ke tiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China di peringkat pertama dan India di peringkat ke dua.

Menurut Menteri Kesehatan Indonesia, Nila Moeloek lebih dari sepertiga atau 36,3 persen penduduk Indonesia saat ini menjadi perokok. Bahkan 20 persen remaja usia 13-15 tahun adalah perokok. Hal yang lebih mencengangkan, kata Nila, saat ini, remaja laki-laki yang merokok kian meningkat. data pada tahun lalu memperlihatkan peningkatan jumlah perokok remaja laki-laki mencapai 58,8 persen. Kebiasaan merokok di Indonesia telah membunuh setidaknya 235ribu jiwa setiap tahun.

Pemerintah dan masyarakat secara luas diharapkan serius dalam mengatasi masalah pemakaian rokok di Indonesia, khususnya bagi generasi muda karena akan berisiko terhadap kesehatan dan kualitas SDM

diwaktu-waktu mendatang, Bahkanada kemungkinan anak perokok mengalami stunting lebih dari 5,5 persen dibandingkan anak bukan perokok. Perilaku merokok orang tua pun ikut memengaruhi tingkat intelegensi anak secara tidak langsung (dampak akibat stunting).Gangguan kesehatan akibat merokok secara langsung maupun tidak akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas SDMdan generasi produktif secara umum. Pemerintah Desa diharapkan juga mendukung pemerintah pusat dalam mengatasi masalah peningkatan jumlah perokok di Indonesia, karena kualitas SDM di desa juga akan mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

B.N. Marbun, (1945-2010) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Menurut pendapat Nurul Qalbi Wulansari Muslimin, (Skripsi, 2016).

Untuk menciptakan/membangun desa yang sehat bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pengetahuan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk

senantiasa membiasakan hidup sehat dan menjaga lingkungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar dapat beraktivitas dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto (2006) dibutuhkan tekad dan kerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang merupakan desa yang pertama di Indonesia yang berupaya mewujudkan kawasan yang sehat bagi masyarakatnya dengan cara mewujudkan kawasan bebas asap rokok. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi, berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, dan berhak dalam menyelenggarakan serta mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Desa Bone-Bone merupakan desa yang memiliki keindahan alam pegunungan yang masih asli mengingat Desa Bone-Bone terletak di kaki Gunung Latimojong, kondisi iklim yang dingin dan sejuk. Namun, di daerah pegunungan di Sulawesi Selatan, Bone Bone, dalam 11 tahun terakhir menjadi desa bebas rokok. Tak ditemui perokok dan

penjual rokok di desa ini. Keberhasilan desa ini menjadi kawasan bebas rokok juga diikuti oleh bupati, camat dan sejumlah kepala desa lain.

Kepemimpinan yang berada di desa/kelurahan mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus dalam mempengaruhi masyarakat yang cukup besar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jabatan tertinggi di desa yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan di desa adalah Kepala desa. Kepala desa merupakan orang yang mempunyai kekuasaan yang sah menyangkut urusan desa. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kepala Desa Bone-Bone dalam mewujudkan kawasan dan masyarakat yang sehat, adalah dengan berupaya untuk mewujudkan Kawasan Bebas Asap Rokok di desanya. Kepala Desa membuat kebijakan ditingkat desa yang dituangkan dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Keberhasilan dalam upaya mewujudkan kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone membuat Desa tersebut menjadi suatu kawasan percontohan untuk daerah/desa sehat, dan menjadi desa terkenal baik dalam negeri maupun mancanegara.

Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok yang dicetuskan pertama kali Di Desa Bone-Bone ini didasari atas kekhawatiran dari para tokoh masyarakat tentang kondisi masyarakat Desa Bone-Bone yang sudah sangat terbiasa dengan rokok, dimana rokok bukan hanya dinikmati oleh orang dewasa saja tapi juga dikonsumsi oleh anak-anak yang masih berusia 6-12 tahun. Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok memberlakukan larangan kepada masyarakat Desa Bone-Bone untuk tidak merokok di seluruh kawasan Desa BoneBone. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 Bab V Pasal 8 yang berbunyi“Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktifitas merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok di wilayah Desa Bone- Bone”.

B. KERANGKAH TEORI

B.1 Definisi Kebijakan

Menurut Dye (dalam Abidin, 2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai “pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu” (whatever governments choose to do or not to do).

B.2 Pengertian Kebijakan Publik.

Pengertian kebijakan publik menurut W.I. Jenkins (1978) dalam Abdul Wahab (2012:15): “Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batasan kewenangan-kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut. Dari beberapa pengertian tentang Kebijakan Publik menurut beberapa ahli tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan atau kondisi tertentu yang terkait publik.

B.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn teori kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

1. Tahap Pembentukan Agenda
2. Tahap Formulasi Kebijakan
3. Tahap Legitimasi Kebijakan
4. Tahap Implementasi Kebijakan
5. Tahap Evaluasi Kebijakan

a. Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Willam. N. dunn (2003). Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tingkatan dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak.

b. Tipe Evaluasi Kebijakan Publik Menurut Langbein (1980:5) tipe riset evaluasi dibagi menjadi 2 macam tipe: *riset process* dan *riset outcomes*. Metode riset juga dibedakan menjadi metode deskriptif dan kausal.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Desa Bone-Bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai fokus penelitian penulis adalah bagaimana evaluasi kebijakan dan dampak dari pelaksanaan peraturan desa Nomor 1 Tahun 2009 tentang kawasan Bebas Asap Rokok oleh pemerintah

terhadap masyarakat Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. sasaran informan untuk menggali informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bone-Bone, Petugas medis, Guru, Masyarakat Desa Bone-Bone. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1 Kebijakan Pemerintah Desa BoneBone Tentang Kawasan Bebas AsapRokok

Sejak Tahun 2009, pada Tanggal 11 September Peraturan Desa (PERDES) Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di implementasikan secara resmi. Namun demikian, meskipun Perdes tentang Kawasan Bebas Asap Rokok telah di berlakukan ternyata masyarakat belum dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Pada tahun 2011 baru kemudian masyarakat dapat memahami akan pentingnya bebas asap rokok. Salah satu alasan mengapa masyarakat lambat memahami kebijakan pemerintah setempat,

dikarenakan kurang jelasnya informasi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan.

Pola penerapan Perdes Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok yang di jalankan pemerintah desa yakni melakukan sosialisasi, sosialisasi ini untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari Perdes Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawawsan Bebas Asap Rokok. Selain itu sosialisasi juga dimaksudkan untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Perlu dilaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada seluruh komponen masyarakat baik masyarakat lokal maupun para pemangku kepentingan lainnya, untuk membuat masyarakat menerima, memahami dan mendukung suatu kebijakan yang telah dibuat. Sistem sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bone-Bone untuk melaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada masyarakat melalui berbagai teknik sosialisasi yaitu melalui sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung.

- a. Sosialisasi Langsung
- b. Sosialisasi Tidak Langsung

D.2 Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone.

Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini meliputi: (1) tingkat pencapaian tujuan

kebijakan kawasan bebas asap rokok. (2) tingkat pencapaian sasaran kebijakan. (3) tingkat efisiensi kebijakan kawasan bebas asap rokok (biaya dan manfaat). (4) tingkat penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. (5) dampak dari kebijakan tentang kawasan bebas asap rokok.

Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil wawancara dari masing-masing Indikator evaluasi kebijakan kawasan bebas asap rokok Di Desa BoneBone dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok
 - a. Tujuan Terhadap Perlindungan Kesehatan
 - b. Tujuan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Pengguna Rokok
2. Tingkat Pencapaian Sasaran Kebijakan
 - a. Kecenderungan Penurunan Usia Produktif Sebagai Pengguna Rokok
 - b. Kecenderungan Penurunan Anak Usia Remaja Sebagai Pengguna Rokok.
3. Tingkat Efisiensi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok (Biaya Dan Manfaat)

- a. Biaya Yang Dikeluarkan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Kawasan Bebas Asap Rokok
 - b. Manfaat Yang Diterima Di Peroleh Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Kawasan Bebas Asap Rokok.
4. Tingkat Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Kebijakan
- a. Penyimpangan Terhadap Teknis Pelaksanaan Program Kawasan Bebas Asap Rokok.
 - b. Penyimpangan yang Dilakukan Oleh Aparatur Desa Dalam Melaksanakan Program Kawasan Bebas Asap Rokok
5. Dampak Dari Kebijakan Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.
- a. Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat.
 - b. Dampak penurunan penjual rokok.
 - c. Dampak Terhadap Pendapatan Masyarakat
 - d. Dampak Terhadap Hubungan Sosial Dan Masyarakat.

D.3 Pembahasan Tentang Dampak Pelaksanaan Perdes Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.

Berdasarkan Penelitian Tentang Dampak Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Bebas Asap

Rokok Di Desa Bone-Bone dapat diketahui bahwa :

- 1) Tingkat pencapaian tujuan kebijakan kawasan bebas asap rokok sudah baik hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penyakit yang disebabkan oleh asap rokok dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan rokok. Pencapaian tujuan tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada Di Desa Bone-Bone terutama pengolahan hasil perkebunan kopi. Sebagai akibatnya perekonomian masyarakat Di Desa Bone-Bone juga meningkat.
- 2) Tingkat pencapaian sasaran kebijakan. Cukup berhasil hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan penurunan usia produktif sebagai pengguna rokok. Yang mencapai 85% pada Tahun 2019. Selain itu penduduk usia remaja yang menggunakan rokok juga menurun. Hal ini dapat di lihat dalam pelaksanaan pertemuan-pertemuan yang diadakan masyarakat tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan Rokok.
- 3) Pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok cukup Efisien. Hal ini dapat diketahui bahwa setelah masyarakat mengetahui tentang bahaya penggunaa

rokok maka pemerintah tidak memerlukan biaya dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan bebas asap rokok. Pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari dampak pelaksanaan kebijakan kawasan Bebas asap rokok yang ditunjukkan dari adanya peningkatan perekonomian masyarakat yang merupakan hasil dari peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam Di Desa Bone-Bone.

- 4) Tingkat penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Di Desa Bone-Bone masih terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok, karena masih ada yang melanggar peraturan kawasan bebas asap rokok dengan cara merokok sembunyi-sembunyi. (Dalam hal ini Di Desa Bone-Bone ada hukuman bagi yang melanggar peraturan dalam hal merokok yaitu diusir dari kampung, dan bisa masuk kembali dengan syarat tanpa rokok) hal tersebut menjelaan bahwa penegakkan peraturaan untuk melaksanakan kebijakan kawasan bebas asap rokok bisa di laksanakan dengan cukup baik. Peraturan yang berlaku Di Desa Bone-Bone untuk melaksanakan kawasan bebas asap rokok

antara lain : (1). jika ada orang yang merokok di kawasan bebas asap rokok maka dia diharuskan untuk keluar dari kawasan tersebut ; (2). hukum bagi yang melanggar peraturan adalah membersihkan mesjid, jalan atau tempat Umum lainnya;(3). bagi pelanggar peraturan dikenakan denda

- 5) Dampak dari kebijakan tentang kawasan bebas asap rokok. sangat baik dan sangat terasa, bahkan mampu mengubah pola fikir masyarakat, kualitas dan kebersihan lingkungan, peningkatan perekonomian, kesehatan, sertahubungan sosial. Pelaksanaan kebijakana kawasan bebas asap rokok juga mampu menyadarkan perokok aktif dan pasif berhenti merokok. Setelah kebijakan kawasan bebas asap rokok dikontrol dengan cepat, tepat dan tegas bau asap rokok tak terasa lagi, puntung rokok tak berserakan bahkan tidak ada lagi yang terlihat. Masyarakat Desa Bone-Bone sekarang lebih giat bekerja sebab tubuh yang mereka andalkan sehat bugar untuk tetap maju mencari rezeki.

Dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap dampak Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone dapat diketahui bahwa Perdes No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok cukup

berhasil meskipun masih ada beberapa kekurangan. Sehingga kebijakan tersebut dapat dilanjutkan. Agar pencapaian tujuan dapat maksimal maka Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone Bone dapat didukung dengan penyusunan peraturan yang terkait dengan pengawasan pelaksanaannya. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok pengawas kawasan bebas asap rokok di beberapa tempat di wilayah Desa Bone- Bone, seperti kelompok pengawas di sekolah, di pertokohan, di terminal atau tempat-tempat umum lainnya. Selain itu perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan sosialisasi melalui beberapa cara serta peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Merujuk pada Puput Tri Wahyuningsih, Idham Ibtu, I (2009). bahwa Pentingnya meningkatkan komunikasi dengan cara membuka akses informasi public melalui aplikasi yang berfungsi untuk berbagi informasi, pengetahuan, aspirasi dan penanganan keluhan dari semua pihak dalam perencanaan daerah. Sedangkan hambatan yang teridentifikasi yaitu kesadaran warga yang dimiliki oleh kelompok pengawas, pimpinan pihak-pihak berkepentingan, terutama anggota organisasi berbasis warga

menjadi pelaku perubahan sosial-ekonomi secara aktif dan mandiri.

E. KESIMPULAN

E.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di wilayah Desa Bone-Bone ini sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dari keberhasilannya dalam : (1). pencapaian tujuan kebijakan kawasan bebas asap rokok; (2). pencapaian sasaran kebijakan; (3). efisiensi kebijakan ; (4). sedikitnya penyimpangan yang terjadi; (5). dampak positive dari kebijakan tentang kawasan bebas asap rokok.
2. Dampak dari pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, yang diterapkan Di Desa Bone-Bone adalah sebagai: (1). Peningkatan kesehatan masyarakat; (2). Penurunan jumlah penjual rokok; (3). Peningkatan perekonomian masyarakat; (4). Meningkatnya hubungan sosial yang positive di masyarakat.

E.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian tentang implementasi Perdes Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa Bone-Bone dalam melaksanakan kebijakan kawasan bebas asap rokok, yaitu:

1. Diharapkan agar penelitian ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah Desa Bone-Bone dalam melaksanakan kebijakan Di Desa Bone-Bone khususnya kebijakan kawasan bebas asap rokok yaitu pemerintah Desa Bone-Bone harus bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakatnya, agar masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun bahkan bisa berhenti merokok.
2. Diharapkan agar pemerintah dan masyarakat setempat dapat membentuk kelompok yang menjadi pengawas terhadap berjalannya kebijakan ini. Kelompok ini dapat berasal dari masyarakat, artinya dilakukan pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat membantu dalam mengingatkan atau menegur masyarakat yang kedapatan sedang merokok Di Desa Bone-Bone. Kelompok ini juga dapat menjadi sumber

laporan terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di desa tersebut. Bagi masyarakat atau pemerintah desa yang tidak mau mematuhi peraturan desa tersebut harus diberikan sanksi yang tegas.

Karena tanpa sanksi sulit untuk melakukan perubahan perilaku. Serta sarana dan prasarana penunjang kesehatan Di Desa Bone-Bone dapat ditambah atau dimaksimalkan dengan baik agar bias menunjang pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok.

3. Diharapkan Sosialisasi langsung dan tidak langsung untuk menjaga pengoptimalkan Peraturan desa (PERDES). Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan
4. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian Di Desa BoneBone. perlu mempertimbangkan kemampuan komunikasi dengan menggunakan bahasa daerah setempat sehingga penggalian data dapat diperoleh dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

AG. Subarsono : 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Abidin, Said Zainal : 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.

Kebijakan Publik formulasi, Iplementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:

LeutikaPrio Sutarto, :*Dasar-Dasar Organisasi, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1995),*

S Wibawa, Y Prabuningrat, A Pramusinto *Raja Grafindo Persada, Jakarta Evaluasi Kebijakan Publik. University Press, 2003), h. 22.*

Soerjono Soekanto, :*Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006), h. 213 Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 123-124 .*

Samodra Wibawa dkk :1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rujukan Dari Internet.

KebijakanPublik (Definisi & Implementasi) Sep 25, 2013: [https://www.slideshare.net/alviandputra9833/kebijakan-publik-definisiimplementasiRokok dan Ancamannya bagi Masa Depan Anak: Sabtu 01 Juni 2019](https://www.slideshare.net/alviandputra9833/kebijakan-publik-definisiimplementasiRokok-dan-Ancamannya-bagi-Masa-Depan-Anak-Sabtu-01-Juni-2019),: <https://mediaindonesia.com/read/detail/238938-rokok-dan-ancamannyabagi-masa-depan-anak>Selain menyebabkan gangguan

kesehatan, konsumsi rokok juga menyebabkan kerugian ekonomi, baik di tingkat rumah tangga maupun di masyarakat.<http://www.depkes.go.id/artic le/view/2078/merokok-membahayakankesehatan-dan-merugikan-perekonomianmasyarakat.html>PengamananRokokBagiKesehatan PP192003: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP192003PengamananRokokBagiKesehatan.pdf>

YLKI Usul Pemerintah Buat Peta KankerSenin 08 Jul 2019: <https://nasional.republika.co.id/berita/pu b50h366/ylki-usul-pemerintah-buat-petakanker>

<https://www.slideshare.net/alviandputra9833/kebijakanpublikdefinisiimplementasi>

<http://eprints.uny.ac.id/24013/3/BAB%20II.pdf>

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

RPJMDes Tahun 2014-2019 Desa BoneBone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Mulyono Sri Hutomo19 Sep 2016 <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2605034/prestasi-desa-bone-bone-telah-11-tahun-bebas-asap-rokok>

Evaluasi Kebijakan 6.01.2017[https://www.bastamanography.id/evaluasi-kebijakan/Puput-Tri-Wahyuningsih, Idham Ibty, I \(2009\). Publika](https://www.bastamanography.id/evaluasi-kebijakan/Puput-Tri-Wahyuningsih-Idham-Ibty-I-(2009).Publika)